



JURNAL PENELITIAN

Volume 15, Nomor 2, Agustus 2021

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v15i2.12965>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian>

FILSAFAT TERAPAN PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM AKOMODATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Akhmad Soleh

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
solehsujai@gmail.com

Nur Said

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
nursaid@iainkudus.ac.id

Abstract

At the end of 2021, the President of the Republic of Indonesia has signed the formation of the National Commission for Disabilities (KND). They certainly need research data to support research-based policies. This article formulates the applied philosophy of disability-responsive Islamic higher education in Indonesia with a case study at IAIN Alaudin Makassar. This study uses a philosophical, phenomenological and educational policy approach. The data collected by observation, interviews and documentation were then analyzed with a philosophical and phenomenological perspective within the framework of education policy. This study concludes that the most important thing and is the main capital in building an inclusive campus is the issue of world view, namely the philosophical foundation that gives birth to the attitudes, behavior and culture of the campus community and society as a whole to build an inclusive campus for students with disabilities. With a philosophical vision of becoming a center for

enlightenment and transformation of science and technology based on Islamic civilization, this is a curriculum idea that has the potential to be reconstructed into a curriculum document as a reference in curriculum implementation in achieving disability-responsive educational goals. This framework of thinking is part of an applied Islamic paradigm that is in line with the reasoning of the religion of peace or as a form of prophetic thinking paradigm based on theo-anthropocentric existentialist philosophy of Islamic Religious Higher Education in Indonesia.

Keywords: *Applied philosophy, Accommodation, Disability education, PTKI*

Abstrak

Pengubuhjung 2021, Presiden RI telah menandatangani terbentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). Mereka tentu membutuhkan data hasil riset sebagai pendukung kebijakan berbasis riset (research based policy). Artikel ini menformulasikan filsafat terapan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang responsif disabilitas di Indonesia dengan studi kasus di LAIN Alaudin Makasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, fenomenologis dan pendekatan kebijakan pendidikan. Data yang dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis dengan perspektif filosofis dan fenomenologis dalam bingkai kebijakan pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hal terpenting dan merupakan modal utama dalam membangun kampus yang inklusif yaitu persoalan cara pandang (world view) yakni landasan filosofis yang melahirkan sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara keseluruhan untuk membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas. Dengan visi filosofis menjadi pusat pencerahan dan transformasi IPTEK berbasis peradaban Islam, hal ini merupakan ide kurikulum yang potensial direkonstruksi menjadi dokumen kurikulum sebagai acuan dalam implementasi kurikulum dalam menggapai tujuan pendidikan yang responsif disabilitas. Kerangka berpikir seperti ini adalah bagian dari paradigma Islam terapan yang sejalan dengan nalar agamaisasi perdamaian atau sebagai wujud paradigma berfikir profetik berbasis filsafat eksistensialis teo-antroposentris dari PTKI di Indonesia.

Kata Kunci: *Filsafat terapan, akomodasi, pendidikan disabilitas, PTKI*

A. Pendahuluan

Pesan utama Islam adalah ramah kepada seluruh semesta alam. Demikian juga tercantum dalam ideologi bangsa, Pancasila, sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan ini spirit inilah sejak tahun 2016 negara Indonesia sudah memiliki payung hukum Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa tahun berikutnya keluar Perpres No.68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND). Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 53/M Tahun 2021 Presiden mengangkat Keanggotaan KND periode 2021 – 2026. Semua itu diupayakan dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di berbagai instansi termasuk instansi pendidikan.

Dengan demikian asas-asas pengembangan kurikulum di berbagai jenjang pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) disamping landasan sosial budaya, psikologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah juga landasan filsafat. Ketika PTKI sejak awal mengakomodasi kebutuhan pembelajaran yang responsif disabilitas, maka asas filsafat yang dibangun adalah filsafat pendidikan yang responsif disabilitas atau meminjam istilah Musa Asy'arie sebagai filsafat profetik yang dibangun dari dimensi keteladanan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Muslim A.Kadir menyebutnya sebagai paradigma Islam terapan yang kemudian menjadi filsafat terapan dalam bahasan artikel ini.¹

¹ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001) hlm. 19. Baca juga, Bandingkan dengan Muslim A. Kadir. *Ilmu Islam Terapan: Mengagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 55. Baca juga, Zaprulkhan, *Paradigma Berpikir Profetik Musa Asy'arie*, Yogyakarta: LESFI, 2020), 46.

PTKI sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mendapat amanah guna mencerdaskan kehidupan masyarakat selalu berpijak pada “Tiga Pilar Pembangunan Pendidikan,” *pertama*, peningkatan dan pemerataan akses pendidikan untuk semua. *Kedua*, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan bagi peningkatan kemandirian dan peradaban bangsa dan, *ketiga*, peningkatan manajemen kepemimpinan pendidikan, pertanggungjawaban dan citra publik.² Ketiga pilar tersebut menjadi acuan dasar dalam mengantarkan perguruan tinggi disamping sebagai transfer pengetahuan juga sebagai transfer nilai sebagai konsekuensi transformasi keilmuan yang dipelajari mahasiswa dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, ternyata sampai saat ini belum dicapai secara optimal. Tidak sedikit di antara angkatan usia mahasiswa belum dapat kuliah karena berbagai keterbatasan. Secara khusus keterbatasan akses belajar di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dialami oleh para penyandang disabilitas yang sudah memasuki usia kuliah. Minat kuliah di kalangan penyandang disabilitas pada dasarnya sangat tinggi, hanya saja ketersediaan PTKIN yang telah menyediakan aspek-aspek pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, dirasakan masih terbatas.³

Keterbatasan itu misalnya pada aspek kurikulum di antaranya ketersediaan kurikulum yang akomodatif dan pengajar berkompoten komitmen dalam pendidikan penyandang disabilitas, ketersediaan unit layanan khusus yang memiliki program layanan, advokasi dan pemberdayaan. Ketersediaan strategi dan media pembelajaran hingga sarana prasarana kampus serta sistem evaluasi yang akomodatif terhadap penyandang disabilitas. Sementara problematika mahasiswa penyandang disabilitas yang

² Suparlan, “Empat Pilar Pembangunan Pendidikan”, dalam <https://suparlan.org/45/empat-pilar-pembangunan-pendidikan> (diakses 20 Nopember 2021).

³ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi: Studi Kasus Empat Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: LKiS, 2016)

sedang mengikuti proses belajar mengajar di kelas juga beragam di antaranya adalah : *pertama*, disabilitas Tunanetra mempunyai masalah dengan hal-hal yang bersifat visual (penglihatan) seperti ; tulisan, gambar, grafik, yang muncul di papan tulis dan di layar proyektor yang tidak di diskripsikan. Gerakan yang muncul akibat aktivitas dosen ketika mengajar yang tidak diucapkan. Sumber literatur yang tidak dalam huruf *braille* atau *soft file* yang bisa diakses melalui *screen reader* atau program *jaws* (komputer suara). *Kedua*, disabilitas tunarungu mempunyai masalah dengan hal-hal yang bersifat audio (pendengaran) seperti ; penjelasan materi dosen yang berbentuk suara tidak di transfer ke dalam tulisan atau tidak di terjemahkan ke dalam bentuk bahasa isyarat (*Sign language*), dan keterbatasan pengayaan bahasa yang dimiliki tunarungu sehingga tidak bisa menyerap bahasa penjelasan dari dosen. *Ketiga*, disabilitas tunadaksa mempunyai masalah pada kondisi bangunan yang tidak aksesibel seperti ; tempat parkir kendaraan, jalur pedestrian, pintu masuk ke dalam gedung, toilet dan tempat ibadah serta kondisi lingkungan bangunan lainnya.⁴

Dengan demikian sebagai wujud komitmen terhadap pembelajaran mahasiswa penyandang disabilitas, pimpinan perguruan tinggi dan tenaga pengajar perlu responsif terhadap penyandang disabilitas dalam hal strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan kurikulum yang akomodatif yang semua itu dibangun dari filsafat terapan yang tak lepas dari keteladanan struktur empirik masa kenabian atau dikenal filsafat kenabian.⁵

Penelitian ini mencoba menelaah kepemimpinan kurikulum berbasis filsafat terapan dalam mengakomodasi terhadap kebutuhan disabilitas. Filsafat terapan yang dimaksud di sini merupakan

⁴ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi studi kasus empat perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta:LKiS, 2016), 91.

⁵ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Berpikir*, (Yogyakarta: LESFI, 2001) hlm. 19. Bandingkan dengan Muslim A. Kadir. *Ilmu Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 55.

epistemologi profetik dimana manusia berpikir selalu menyatu dengan perbuatan sehingga tidak ada perbuatan yang bebas nilai sebagaimana hubungan iman dengan amal sholeh atau dalam istilah Arkoun sebagai hubungan antara Islam sebagai sistem nilai dengan muslim sebagai subyek yang menerapkan nilai-nilai Islam yang ramah tersebut dalam kehidupan nyata termasuk dalam kepemimpinan kurikulum yang akomodatif dengan penyandang disabilitas.⁶ Penelitian ini membatasi diri pada konstruksi filsafat terapan pendidikan yang dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum di UIN Alaudin Makasar sebagai representasi PTKIN di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam rekonstruksi gagasan/ide kurikulum tersebut menjadi desain kurikulum berikut ketersediaan layanan yang responsif disabilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan “kebijakan pendidikan”. Pendekatan fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus pengalaman-pengalaman subyektif manusia dan interpretasi-interpretasi dunia. Fenomenologi menyelidiki pengalaman kesadaran yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan.⁷ Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengungkap persepsi dan pandangan pimpinan perguruan tinggi mengenai implementasi pendidikan disabilitas di UIN Makasar.

Sedangkan pendekatan “kebijakan pendidikan” dalam hal menelaah struktur filsafat terapan yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum yang dijabarkan menjadi visi dan misi serta diejawantahkan dalam keseluruhan desain dan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu

⁶ Baca. Zaprulkhan, *Paradigma Berpikir Profetik Musa Asy'arie*, Yogyakarta: LESFI, 2020), 46. Bandingkan dengan QS. Al. Ahzab: 21. Bandingkan Muslim A. Kadir. *Ilmu Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 39. Baca juga, Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996), 19

⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

masyarakat yang responsif disabilitas.⁸ Data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pendukung terkait topik ini dianalisis menggunakan prosedur analisis kualitatif yang dilakukan sejak pengumpulan data hingga penulisan artikel secara kritis dan fenomenologis.

B. Pembahasan

1. Jejak Transformasi UIN Alauddin Makasar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (baca: UIN Alauddin) adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Makasar. Penamaan UIN di Makasar dengan Alauddin diambil dari nama raja Kesultanan Gowa yang pertama memeluk Islam dan menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Perguruan Tinggi tersebut terletak di 2 lokasi yaitu kampus I di Jalan Sultan Alauddin no. 63 Makasar dengan luas 6,5 ha dan di kampus II di Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata kab. Gowa Sulawesi selatan seluas 39 ha.

Sejarah transformasi UIN Alauddin di bagi menjadi 2 periode. *Periode awal*, masa perkembangan tahun 1965-2005. Pada awalnya IAIN Alauddin Makasar yang kini menjadin UIN Alauddin Makasar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makasar pada tanggal 10 Nopember 1962.

Selanjutnya penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang

⁸ H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140.

Makasar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian dilanjutkan pendirian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu cabang di Makasar sejak 28 Oktober 1965 berdasarkan KMA Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

Sedangkan “Alauddin” sebagai nama dari IAIN di Makasar diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk agama Islam dan berperan sejarah dakwah Islam di Makasar. Nama tersebut juga sekaligus sebagai sebuah harapan sebagai api semangat dalam membawa kejayaan Islam di masa yang akan datang di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari Indonesia bagian Timur pada umumnya.

Semula IAIN Alauddin yang hanya memiliki tiga buah Fakultas, kemudian berkembang menjadi lima Fakultas dengan tambahan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan KMA No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 Nopember 1967. Kemudian berdiri Fakultas Dakwah dengan KMA RI No.253 Tahun 1971. Fakultas ini semula berkedudukan di Bulukumba. Namun dengan berdasarkan Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah ini dialihkan ke Makasar. Setelah itu disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu sejak 1883, dengan KMA No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makasar menjadi PPs yang otonom.⁹

Periode kedua, fase tahun 2005 sampai perkembangannya sekarang. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta sebagai wujud respon kebijakan terkini terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

⁹ Disunting dari “Sejarah Perkembangan” dalam <https://uin-alauddin.ac.id/profil/sejarah-perkembangan> (diakses 20 Desember 2021)

No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I. disamakan kedudukannya. Sebagai konsekwensinya untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I., diperlukan transformasi kelembagaan dari Institut menjadi Universitas. Maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin dan *stake holder*, maka diusulkanlah transformasi dari IAIN Alauddin Makasar menjadi UIN Alauddin Makasar. Maka, mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan IAIN Alauddin Makasar berubah menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Alauddinn Makasar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005.¹⁰ Kini UIN Alaudin Makasar berkembang pesat dengan sejumlah prodi lintas disiplin ilmu yang sejak awal diharapkan bisa memberi akses bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas meskipun masih dalam jumlah yang terbatas.

Secara epistemologis perjalanan dan struktur fakultas yang ada di UIN Alaudin Makasar menunjukkan konsep Universitas Islam yang sejalan dengan konsep Universitas Islam yang dibangun dari kesadaran kesatuan ilmu berbasis tauhid, risalah dan *akhirah* dengan semangat sinergitas ilmu modern sains dengan ilmu tradisi Islam (tradisionalisme Islam).¹¹ Karena berbasis tauhid tentu peradaban kampus yang dibangun adalah pendidikan humanis yang responsif disabilitas sebagai sistem ide yang direkonstruksi menjadi desain kurikulum dan inovasi implementasinya secara progresif.

2. Aksesibilitas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam rangka mewujudkan aksesibilitas pendidikan bagi Penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi, maka perlu pemikiran

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Aki Asyraf, *Konsep Universitas Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), 60.

dan kesungguhan yang terkait dengan integritas dan interkoneksi dalam pendidikan di Perguruan Tinggi. Dalam konteks ini peneliti akan menggunakan tiga teori untuk menginvestigasi aksesibilitas Penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi. *Pertama*, teori politik pendidikan yang dikonseptualisasi oleh Paulo Freire. *Kedua*, teori Penyandang disabilitas yang digagas oleh Peter Coleridge. *Ketiga*, teori kebijakan pendidikan yang digagas oleh H. A. R. Tilaar.

Paulo Freire merupakan tokoh pendidik revolusioner di abad 20 dan pengaruhnya masih terasa di abad 21. Teks-teks yang berkaitan dengan Freire terus berkembang dan bisa dibagi ke dalam lima macam, sebagaimana yang diulas oleh M. Agus Nuryatno.¹² *Pertama*, teks yang ditulis oleh Freire sendiri.¹³ *Kedua*, teks hasil kolaborasi Freire dengan penulis lain.¹⁴ *Ketiga*, teks yang mengkomparasikan pemikiran Freire dengan tokoh lain, seperti Mahatma Gandhi, Jurgen Habermas dan Che Guevara.¹⁵ *Keempat*, teks yang secara khusus membahas pemikiran Freire.¹⁶ *Kelima*, teks

¹² M. Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis* (Yogyakarta: 2008), 64.

¹³ Baca Paulo Freire, *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation* (South Hadley, Mass.: Bergin & Garvey, 1985); Bandingkan, Paulo Freire, *Education: The Practice of Freedom* (London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 1976); Paulo Freire *Cultural Action for Freedom* (Harmondsworth: Penguin, 1972); Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Herder and Herder, 1971); Bandingkan Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness* (New York: Seabury Press, 1973)

¹⁴ Teks-teks yang membandingkan Paulo Freire dengan tokoh-tokoh pemikir lain, antara lain, R. Burns dan T. Weber, *Gandhi and Freire on Campus: Theory and Practice in Tertiary Peace Studies Programs* (Peace Education Miniprints No. 76, 1995); Peter McLaren, *Che Guevara, Paulo Freire and the Pedagogy of Revolution* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000). Diana Coben, *Radical Heroes: Gramsci, Freire, and the Politics of Education* (New York: Garland Pub., 1998). John L. Elias, *Conscientization and Deschooling: Freire's and Illich's Proposals for Reshaping Society* (Philadelphia: Westmister Press, 1976); Raymond A. Morrow and Carlos Alberto Torres, *Reading Freire and Habermas: Critical Pedagogy and Transformative Social Change* (New York and London: Teachers College Press, 2002); Peter McLaren, *Che Guevara, Paulo Freire and the Pedagogy of Revolution* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000).

¹⁵ Baca, R. Burns dan T. Weber, *Gandhi and Freire on Campus: Theory and Practice in Tertiary Peace Studies Programs* (Peace Education Miniprints No. 76, 1995); Bandingkan dengan Diana Coben, *Radical Heroes: Gramsci, Freire, and the Politics of Education* (New York: Garland Pub., 1998); L. Narayan, *Freire and Gandhi: Their Relevance for Social Work Education* (International Social Work 43: 193, 2000); Peter Mayo, *Gramsci, Freire, and Adult Education: Possibilities for Transformative Action* (London, New York: Zed Books, 1998).

¹⁶ Baca, Dennis E. Collins, *Paulo Freire: His Life, Works, and Thought* (New York:

yang menganalisis aplikasi metode Freire di pelbagai penjuru dunia, seperti Amerika Latin, Afrika, Asia, Eropa, dan lain sebagainya.¹⁷

Freire berpendapat bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari politik. “Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pendidikan merupakan tindakan politik, sebagaimana tidak cukup untuk mengatakan bahwa tindakan politik juga bermuatan edukatif. Kita perlu sekali menyadari sifat alamiah politik dalam pendidikan.”¹⁸ Ungkapan Freire “*education is politics*” memberikan pemahaman bahwa berbagai aktivitas pendidikan dan pengajaran tak lepas dari kepentingan politik dengan berbagai komponennya. Dari sisi kebijakan, apapun kebijakan pendidikan yang diambil memungkinkan terakomodasinya kelompok sosial tertentu dan tersingkirnya kelompok sosial yang lain.

Dari sisi pedagogis di kelas, apapun yang dilakukan guru senantiasa memberikan andil dalam membentuk kepribadian peserta didik. Guru memiliki peluang yang sama besarnya untuk menjadikan peserta didik menjadi anak yang aktif atau pasif, kritis atau adaptif, suka bertanya atau pendiam. Inilah implikasi politis dari setiap kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, tidak ada pendidikan yang netral, karena apapun pilihan kebijakan pendidikan dan pilihan metode mengajar dan isi yang akan diajarkan di dalam kelas selalu memiliki dampak politis.

Paulist Press, 1977); Stanley M. Grabowski, *Paulo Freire: A Revolutionary Dilemma for the Adult Educator* (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Publications in Continuing Education, 1972). Baca juga, Paul V. Taylor, *The Texts of Paulo Freire* (Philadelphia: Open University Press, 1993); Bandingkan dengan Peter Mayo, *Liberating Praxis: Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics* (Westport, CT: Praeger, 2004).

¹⁷ Misalnya dalam, Paul V. Taylor, *The Texts of Paulo Freire* (Philadelphia: Open University Press, 1993); Dennis E. Collins, *Paulo Freire: His Life, Works, and Thought* (New York: Paulist Press, 1977); Peter McLaren dan Peter Leonard, *Paulo Freire: A Critical Encounter* (London, New York: Routledge, 1993).

¹⁸ Paulo Freire, *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage* (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1998), 46.

Peneliti akan menggunakan konsep politik pendidikan Freire untuk memahami keterkaitan antara pendidikan dan politik, yaitu apakah politik pendidikan perguruan tinggi memiliki keberpihakan dan mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan Penyandang disabilitas ataukah tidak, serta sejauh mana keberpihakan tersebut diwujudkan dalam praktek pendidikan. Sebagai basis teori penulis juga meminjam teori Penyandang disabilitas yang ditawarkan oleh Peter Coleridge yang membagi tiga model pandangan disabilitas, yaitu model tradisional, model kedokteran, dan model sosial.¹⁹ Model tradisional cenderung model dibangun oleh kesadaran nilai-nilai pemahaman agama dan budaya. Ada sebagian pemahaman agama dan budaya yang menilai bahwa “kecacatan” sebagai bentuk hukuman individu karena sebab tertentu. Yang memprihatinkan mereka yang cacat dianggap memiliki dosa besar, kotor dan karenanya dianggap tercela. Pandangan ini memang sudah tidak dominan, namun di beberapa tempat pandangan seperti ini masih berlaku.

Pandangan medis beranggapan bahwa kecacatan dinilai sebagai sebuah isu medis. Untuk itu dibutuhkan pendekatan medis. Masalah kecacatan dikaitkan dengan persoalan abnormalitas. Maka, mereka yang cacat dianggap sebagai abnormal, dan oleh karena itu perlu “dinormalkan”. Butuh dikoreksi, diluruskan, dan disembuhkan agar menjadi normal kembali (normalisasi abnormalitas). Baik pandangan tradisional dan medis sama-sama cenderung menganggap masalah kecacatan sebagai masalah pribadi masing-masing penyandang cacat, tanpa dikaitkan dengan keseluruhan bangunan sosial kemasyarakatan. Pandangan ini tampaknya mengarah kepada individualisasi masalah kecacatan, yakni memandang kecacatan sebagai problem individu dan tidak hubungannya dengan faktor eksternal baik konteks maupun struktur sosial yang saling berkait kelindan.

¹⁹ Peter Coleridge, *Penyandang Cacat, Pembebasan, dan Pembangunan*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:1997), 286-287

Kedua pandangan di atas berbeda dengan pandangan sosial yang menilai bahwa masalah kecacatan tidak bisa terlepas dari keterkaitan dengan struktur sosial budaya dan karenanya konteksnya sangat turut mengkonstruksi pemahaman. Pandangan tradisional dan medis dianggap kurang humanis dan tidak berorientasi pemberdayaan kelompok Penyandang disabilitas. Model pandangan sosial berasumsi adanya semangat penyatuan kelompok disabilitas dengan masyarakat. Ini berarti ada proses memberdayakan mereka dalam rangka menundukkan rintangan-rintangan struktur sosial. Karena upaya normalisasi, perawatan, atau pengobatan menjadi tidak relevan lagi. Pemberdayaan dalam model sosial ini juga dapat dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian kelompok disabilitas ini secara individu maupun kelompok pada satu sisi diberdayakan agar mampu mentransendensi situasi-batas (rintangan sosial), namun pada sisi lain ruang publik juga harus dikondisikan agar memungkinkan bagi kelompok disabilitas untuk mengaksesnya, termasuk di dalamnya akses pendidikan. Inilah pentingnya pendidika tinggi dalam hal ini PTKI dengan kebijakan yang responsif disabilitas.

Kerangka teori Coleridge ini sangat berguna untuk mengetahui sejauh mana pandangan sistem kepemimpinan di PTKI terhadap Penyandang disabilitas. Apakah secara ontologis mereka dalam memahami kelompok disabilitas cenderung berpandangan tradisional, medis, dan sosial. Pandangan awal pimpinan perguruan tinggi ini sangat menentukan aksesibilitas Penyandang disabilitas terhadap pendidikan tinggi. Jika pimpinan-pimpinan perguruan tinggi memiliki perspektif tradisional dan medis terhadap Penyandang disabilitas maka sangat mungkin akses mereka terhadap pendidikan tinggi terbatas. Tapi jika para pimpinan perguruan tinggi memiliki pandangan sosial terhadap Penyandang disabilitas maka peluang mereka untuk mendapatkan akses belajar dan pemanfaatan fasilitas pendidikan akan terbuka luas.

Teori ketiga yang akan penulis gunakan adalah teori kebijakan H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho yang mengatakan: “Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun tertentu.”²⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan suatu institusi pendidikan tidak bisa dipisahkan dari visi dan misinya. Kebijakan merupakan derivasi dari visi dan misi dalam rangka mencapai tujuan organisasi pendidikan. Visi dan misi suatu institusi pendidikan tentunya juga harus mengacu pada visi dan misi pendidikan nasional. Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dinyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Sedangkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 disebutkan “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Jika mengacu pada dua undang-undang tersebut maka adalah sebuah hak bagi siapa saja untuk mendapatkan pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, etnis, ketunaan, dan lain sebagainya. Teori kebijakan ini akan penulis gunakan untuk menelusuri proses pembuatan kebijakan di perguruan tinggi dalam rangka untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada selama ini sudah sensitif terhadap Penyandang disabilitas atau belum.

Ketiga teori di ataslah yang akan penulis jadikan sebagai kerangka pikir dalam rangka untuk mencari jalan keluar dan pemecahan dalam pendidikan bagi Penyandang disabilitas, karena pada hakekatnya mereka merupakan makhluk kodrati bagian dari alam, makhluk sosial dan dengan berbagai potensi yang bisa dikembangkan sebagaimana dengan manusia yang tidak menyandang ketunaan. Peter Coleridge mengingatkan bahwa upaya untuk memahami ketunaan serta kekuatan-kekuatan sosial-

²⁰ H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 140.

politik di sekelilingnya membawa kita berhadapan muka dengan tujuan pertahanan hidup, kepada ada atau tidak adanya keadilan dan persoalan hubungan antar manusia. Ada wilayah kehidupan yang ditandai dengan kata “Spiritual”, “Membangun” dan “Politis” itu semua hanyalah sisi-sisi yang berbeda namun bersama-sama membentuk persoalan makna kehidupan. Maka pembebasan Penyandang disabilitas berarti persoalan tentang hak-hak dan keadilan yang dijamin oleh hukum dan diwujudkan dalam pergaulan yang memberi rasa berdaya satu sama lain, yang dapat dicapai lewat usaha yang tulus untuk saling memahami.²¹

3. Filsafat (Terapan) Pendidikan Responsif Disabilitas di PTKI

Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag RI, Ali Ramdhani menegaskan regulasi dan kebijakan kependidikan Islam pada Ditjen Pendis Kemenag RI, ditegaskan harus berbasis inklusif, yakni pendidikan yang terbuka tanpa diskriminasi yang memberikan akses untuk untuk semua yang membutuhkan. Maka dibutuhkan ekosistem layanan disabilitas, dalam sebuah insitusi pendidikan termasuk di PTKI.²² Sebagai bagian dari institusi sosial yang bergerak dalam lingkup pendidikan, PTKI dalam hal ini UIN Alaudin memiliki aturan-aturan atau norma-norma berakar dari falsafat pendidikan yang dianutnya yang kemudian diterjemahkan dalam visi dan misi. Visi merupakan landasan dasar dalam menggerakkan sivitas akademika dalam menggapai tujuan bersama. Ia disusun sebagai rekonstruksi gagasan dari berbagai pihak melalui analisis internal maupun eksternal.

²¹ Peter Coleridge, *Kecacatan, Pembebasan, dan Pembangunan*, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar,1997), 286-287.

²² “Kemenag Pastikan Kependidikan Agama Berbasis Inklusif” dalam <https://kemenag.go.id/read/kemenag-pastikan-kependidikan-agama-berbasis-inklusif> (diakses 21 Desember 2021).

Untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dibutuhkan *framework* atau paradigma dasar dalam kepemimpinan yang responsif disabilitas yang kemudian direkonstruksi menjadi turunan kebijakan-kebijakan baik ditingkat Rektorat, Dekanat maupun unit-unit terkait sebagaimana di UIN Alaudin. UIN Alaudin merupakan institusi pendidikan tinggi yang mempunyai Visi: “Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK Berbasis Peradaban Islam,” Sedangkan Misinya adalah : *Pertama*, Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. *Ketiga*, Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UIN Alaudin bertujuan: *Pertama*, Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal. *Kedua*, Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan. *Ketiga*, Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami. *Keempat*, Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.²³

Pada dasarnya UIN Alaudin Makasar telah melaksanakan sebagian produk kebijakannya bagi mahasiswa disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan meskipun belum optimal. Beberapa kebijakan yang berhasil penulis himpun dari wawancara dan

²³ UIN Alaudin Makasar, Pedoman Edukasi, 2016, hlm. 5-6. Lihat juga “Sejarah Perkembangan” dalam <https://uin-alauddin.ac.id/profil/sejarah-perkembangan> (diakses 20 Desember 2021)

penelusuran dokumen sebagai berikut : *Pertama*, UIN Alaudin Makasar dua tahun terakhir ini telah menerima mahasiswa disabilitas secara resmi dan memberikan akses.²⁴ Seperti yang telah penulis temukan di media online-nya UIN Alaudin tertanggal 16 Juli 2017 dan tanggal 25 Juli 2019 Rektor UIN Alaudin memberikan kebijakan bagi penyandang disabilitas seperti pernyataannya saat jumpa pers berikut ini:

Penyandang difabel sebaiknya memang di berikan kesempatan. Karena ada satu pendaftar yang terdata, jadi mungkin baiknya di prioritaskan. Secara internal akan dibicarakan lagi bagaimana tidak lanjutnya.

Hal ini belum dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor UIN Alaudin Nomor 200 tahun 2016 tentang pedoman edukasi UIN Alaudin. Dalam perumusan kebijakannya belum mengacu pada UU disabilitas internasional maupun nasional, juga belum mengacu pada peraturan pemerintah tentang pendidikan disabilitas.²⁵ Struktur organisasi UIN Alaudin Makasar Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Alaudin Makasar diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alaudin Makasar. Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Agama tersebut menyebutkan bahwa UIN Alaudin Makasar terdiri atas: Dewan Penyantun, Rektor dan Pembantu Rektor, Senat Universitas, Fakultas. Fakultas terdiri dari; Syariah dan Hukum, Tarbiyah dan Keguruan, Ushuluddin dan Filsafat, Adab dan Huminora, Dakwah dan Komunikasi, Sains dan Teknologi, Ilmu Kesehatan, Program Pascasarjana. Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Administrasi Umum, Unit Pelaksana Teknis, Perpustakaan, Pusat Bahasa, Pusat Informasi dan Komputer.²⁶

²⁴ Wawancara dengan Rektor dan Wakil Rector III pada tanggal 24 Juli 2019

²⁵ Telaah dokumen buku pedoman edukasi UIN Alaudin Makasar 2016

²⁶ Disunting dari “Struktur Organisasi” dalam <https://uin-alauddin.ac.id/profil/struktur-organisasi> (diakses 21 Desember 2021)

Kedua, telah membangun gedung yang aksesibel bagi disabilitas di fakultas tarbiyah. *Ketiga*, memberikan support pada mahasiswa disabilitas berupa beasiswa. *Ke empat*, Sudah melakukan kerjasama dengan UNICEF dan *Found Foundation* juga sudah menggunakan UU yang terkait dengan penyandang disabilitas baik yang internasional maupun yang nasional. *Kelima*, Mahasiswa disabilitas yang baru masuk kuliah di undang ke depan untuk di berikan support psikologis di hadapan teman-teman mahasiswa non disabilitas. *Keenam* Komitmen kedepan untuk menyiapkan fasilitas yang berupa software sebagai pengganti huruf *Braille*.²⁷

Sedangkan terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas, pimpinan UIN Alaudin menanggapi di media UIN online tertanggal 25 Juli 2019 berikut ini :

Para peserta berkebutuhan khusus adalah isu global yang banyak di bicarakan. Selama ini kami sebenarnya belum berani merespons karena ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan belum sepenuhnya bisa kami hadirkan.²⁸

Pada hakikatnya mahasiswa disabilitas membutuhkan fasilitas pendidikan secara khusus, baik disabilitas tunanetra, tunarungu ataupun tunadaksa. Akan tetapi dari hasil survey dan wawancara peneliti di UIN Alaudin Makasar belum menemukan fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas misalnya; belum ada pusat layanan disabilitas, belum ada program yang terkait dengan mahasiswa disabilitas, belum ada Peraturan secara eksplisit dan khusus bagi mahasiswa disabilitas, belum ada SK rektor yang terkait dengan mahasiswa disabilitas. Belum mengaplikasikan UU tentang disabilitas baik nasional maupun internasional di dalam pembuatan kebijakan bagi mahasiswa disabilitas. Begitu juga sarana dan prasarana yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas.

Namun dengan mencermati visi UIN Alaudin sebagai: “Pusat

²⁷ Wawancara dengan Wakil Rektor III pada tanggal 24 Juli 2019

²⁸ www.uin-alaudin.ac.id disunting tanggal 2 Agustus 2019

Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam” yang kemudian diterjemahkan dalam misi ayat (2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.²⁹

Semangat integrasi nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai *world views*, hal ini menunjukkan nilai-nilai rislah Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* yang *rahmatan lil’alamin*³⁰ dengan tauhid sebagai *core values*nya. Nilai-nilai ajaran Islam yang utama ini tentu membawa kebahagiaan dalam mengantarkan pendidikan untuk semua termasuk bagi penyandang disabilitas tentunya.

Jika ditinjau dari perspektif Ilmu Islam terapan, untuk membentuk keberagaman dalam hal ini kepemimpinan pendidikan yang responsif disabilitas, tidak cukup hanya berhenti pada paradigma *ahkami*, falsafi atau *irfani* semata, tetapi harus juga sampai pada paradigma amali.³¹ Maka dibutuhkan pergeseran dimensi epistemologis dengan konsekuensi perubahan arus pengertian, sifat temuan teori, serta tabi’at produk keilmuan yang dihasilkannya yang berpangkal pada Al Qur’an dan Sunnah.

Al Qur’an dan Sunnah (*the world of text*) memang pada dirinya memiliki kebenaran absolut, namun ketika dipahami oleh para pembaca (*the world of reader*) hak ini menjadi relatif kebenarannya. Maka dibutuhkan nalar agamaisasi kedamaian sebagai antitesis dari nalar agamaisasi kekerasan, mengingat Islam adalah agama

²⁹ Lihat “Sejarah Perkembangan” dalam [VISI MISI DAN TUJUAN \(uisu-alaudidin.ac.id\)](http://uisu-alaudidin.ac.id) (diakses 20 Desember 2021)

³⁰ QS. Anbiya’ ayat 107: “dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Dalam kitab alam Kitab Fathu al-Qodir, Asy-Syaukani berpendapat bahwa makna ayat *rahmatan lil’alamin* adalah menunjukkan visi risalah Rasulullah membawa hukum-hukum syariat sebagai rahmat bagi seluruh manusia tanpa ada keadaan atau alasan khusus yang menjadi pengecualian, sebagai rahmat yang menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baca, Al-Imam Muhammad bin Aly bin Muhammad Asy Syaukany, Fathul Qodir, (2003). Diakses melalui www.altafsir.com tanggal 20 Desember 2021.

³¹ Muslim A. Kadir. *Ilmu Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 31

kemanusiaan.³² Nalar agamaisasi kedamaian dengan asumsi dasar Islam sebagai agama kemanusiaan inilah yang perlu dijadikan sebagai paradigma awal dalam megejawantahkan visi UIN Alaudin menuju kepemimpinan kurikulum yang responsif disabilitas. Dengan demikian semangat integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagaimana tercantum dalam misinya, sesungguhnya UIN Alaudin sudah memiliki ide kurikulum yang berpotensi bisa direkonstruksi menjadi dokumen kurikulum sebagai acuan dalam implementasi kurikulum dalam menggapai tujuan pendidikan yang responsif disabilitas sebagaimana secara tersirat dalam visi dan misinya.

C. Simpulan

Dari beberapa ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan PTKI di bawah Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag RI, telah memiliki komitmen dalam regulasi dan kebijakan kependidikan Islam berbasis inklusif, yakni pendidikan yang tanpa diskriminasi dan setara untuk semua. Maka dibutuhkan ekosistem layanan disabilitas, dalam sebuah insitusi pendidikan termasuk di PTKI.

Sebagai sebuah studi kasus di UIN Alaudin juga menunjukkan paradigma filsafat (terapan) yang tertuang dalam visi dan misinya mencerminkan semangat integrasi antara nilai ajaran Islam yang ramah untuk semua termasuk bagi penyandang disabilitas dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan visi filosofis menjadi pusat pencerahan dan transformasi IPTEK berbasis peradaban Islam hal ini merupakan ide kurikulum yang perlu direkonstruksi menjadi dokumen kurikulum sebagai acuan dalam implementasi kurikulum dalam menggapai tujuan pendidikan yang responsif disabilitas. Kerangka berpikir seperti ini adalah bagian dari paradigma Islam terapan yang sejalan dengan nalar agamaisasi perdamaian

³² Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995). Baca juga, Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia*, (Bandung: Mizan, 2018), 173-174.

atau sebagai wujud paradigma berfikir profetik berbasis filsafat eksistensialis teo-antroposentris. Namun belum terumuskan dalam kebijakan yang eksplisit dalam rekonstruksi dokumen kurikulum yang responsive disabilitas. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola PTKI di Indonesia agar gap antara idealitas filosofis dengan praksis penerapan lapangan semakin minimalis sebagai manifestasi obyektifikasi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1996.
- Asy'arie, Musa, *Filsafat Islam, Sunnah Nabi dalam Beropikir*, Yogyakarta: LESFI, 2001.
- Asy Syaukany, Al-Imam Muhammad bin Aly bin Muhammad, *Fathul Qodir*, (2003). Diakses melalui www.altafsir.com tanggal 20 Desember 2021.
- Burns, Robin & Thomas Weber, "Gandhi and Freire on Campus: Theory and Practice in Tertiary Peace Studies Programs", *Peace Education Miniprints*, No. 76, 1995.
- Coben, Diana, *Radical Heroes: Gramsci, Freire, and the Politics of Education*, New York: Garland Pub., 1998.
- Coleradge, Peter, *Penyandang Cacat, Pembebasan, dan Pembangunan*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Collins, Dennis E., *Paulo Freire: His Life, Works, and Thought*, New York: Paulist Press, 1977.
- Daming, Saharuddin, "Pelembagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat" *Makalah Semiloka*, 2009.
- Darder, Antonio, *Reinventing Paulo Freire: A Pedagogy of Love*, Boulder, CO: Westview Press, 2002.
- Ro'fah Makin, dkk., *Inklusi pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif bagi Mahasiswa Difabel Netra*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dokumen Salamanca, di Spanyol tahun 1994 diselenggarakan oleh Unesco.

- Saharuddin Daming, "Pelembagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat" *Makalah Semiloka*, tidak diterbitkan, 2009.
- Brown S., "Methodological Paradigms that Shape Disability Research", dalam Alberch, G, Burry, M dan Seelman, K., *Handbook of Disability Studies*, (London: Sage), dalam Ro'fah, M.A., PhD., dkk., *Membangun Kampus Inklusif*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Elias, John L., *Conscientization and Deschooling: Freire's and Illich's Proposals for Reshaping Society*, Philadelphia: Westmister Press, 1976.
- _____, *Paulo Freire: Pedagogue of Liberation*, Malabar, Fla.: Krieger Pub. Co., 1994.
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Insist Press, 2002.
- Freire, Paulo, *Cultural Action for Freedom*, Harmondsworth: Penguin, 1972.
- _____, *Education for Critical Consciousness*, New York: Seabury Press, 1973.
- _____, *Education: The Practice of Freedom*, London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 1976.
- _____, *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1998.
- _____, *Pedagogy of the Oppressed*, New York: Herder and Herder, 1971.
- _____, *Pendidikan Kaum Tertindas*; terj. Tim Redaksi LP3ES, Jakarta: LP3ES, 2008.
- _____, *The Politics of Education: Culture, Power, and Liberation*, South Hadley, Mass.: Bergin & Garvey, 1985.

- Fuad, Moh., "Media Pembelajaran", *Makalah*, Yogyakarta: PLPG Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Fung, Victor K., William K. Fung, Yoram R. Wind, *Competing in a Flat World, Building Enterprises for a Borderless World*, Pearson Prentice Hall, 2007.
- Gadotti, Moacir, *Reading Paulo Freire: His Life and Work*, Albany: State University of New York Press, 1994.
- Grabowski, Stanley M., *Paulo Freire: A Revolutionary Dilemma for the Adult Educator*, Syracuse, N.Y: Syracuse University Publications in Continuing Education, 1972.
- HIPENCA, *Implementasi Aksesibilitas Melalui Program Pendidikan Terpadu dan Inklusif*, Jakarta, 2004.
- HWPCI (Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan pada Aksesibilitas Bangunan dan Transportasi Umum bagi Penyandang Cacat dan Lansia*, Jakarta.
- Imron, Ali, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kadir, Muslim A.. *Ilmu Islam Terapan: Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Johnson, Berit H., dkk. (ed.), *Pendidikan Berkebutuhan Khusus*, terj. Susi SR, Bandung: PPS UPI, 2004.
- Kusumarini, Yusita & Tri Noviyanto Puji Utomo, "Analisis Penerapan Konsep 'Desain Universal' pada Sayembara Perancangan", *ITB. J. Vis. Art & Des.* Vol. 2, No. 1, 2008.
- Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107.
- Mace, Ronald, *Accessible Environments: Toward Universal Design*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1991.
- _____, *Universal Design: Housing for the Lifespan of All People*, Carolina: North Carolina State University, 2000.

- Madjid. Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Marcoes, Lies, dkk., *Pokok-Pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: SIGAB-Oxfam, 2004.
- Mayo, Peter, *Gramsci, Freire, and Adult Education: Possibilities for Transformative Action*, London, New York: Zed Books, 1998.
- _____, *Liberating Praxis: Paulo Freire's Legacy for Radical Education and Politics*, Westport, CT: Praeger, 2004.
- Maysaa S. Bazna, Ed.D., dan Tarek A. Hatab, P.E., Disability in The Quran (Reaserch),Pubget.com/search?q=authors%3A%22Maysaa%20S%20Bazna%22.
- McLaren, Peter dan Colin Lankshear, *Politics of Liberation: Paths from Freire*, New York & London: Routledge, 1994.
- _____, dan Peter Leonard, *Paulo Freire: A Critical Encounter*, New York & Londong: Routledge, 1993.
- _____, *Che Guevara, Paulo Freire and the Pedagogy of Revolution*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.
- Narayan, Lata, "Freire and Gandhi: Their Relevance for Social Work Education", *International Social Work*, 2000.
- Nuryatno, Muhammad Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis*, Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- O'Cadiz, Maria Del Pilar, Pia Lindquist Wong, and Carlos Alberto Torres, *Education and Democracy: Paulo Freire, Social Movements, and Educational Reform in Sao Paulo*, Boulder, CO: Westview Press, 1998.
- O'Neil, John, "Can Inclusion Work? A Conversation with Jim Kauffman and Mara Sapon Shevin", *Educational Leadership*, Desember 1994/Januari Vol. 52. No. 4, The Inclusive School, 1995.

- Oliver, Mike, "The Individual and Social Models of Disability", *Paper*, Presented at Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians, 1990.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Silberman, Mel, *Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif*, terj. Surjuli, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Soleh, Akhmad, "Analisis Kebijakan Departemen Agama tentang Demokratisasi Pendidikan dalam Konteks Perlakuan terhadap Penyandang Cacat", *Tesis*, Yogyakarta: PPS UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Soleh, Akhmad, *Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi studi kasus empat perguruan tinggi di daerah istimewa yogyakarta*, Yogyakarta: LKiS, 2016
- Somantri, Sutjihati, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Jakarta: Refika Aditama, 2006.
- Suparlan, "Empat Pilar Pembangunan Pendidikan", dalam <https://suparlan.org/45/empat-pilar-pembangunan-pendidikan> (diakses 20 Nopember 2021).
- Tilaar, H. A. R., dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Wijaya, Aksin, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia*, Bandung: Mizan, 2018.
- Zaprul Khan, *Paradigma Berpikirt Profetik Musa Asy'arie*, Yogyakarta: LESFI, 2020
- Bilgrami, Hamid Haan & Asyraf, Sayyid Ali, *Konseo Universitas Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.